

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI KELURAHAN TALANG BABAT

Darmawansah Hikma¹, Nilfatri², Erwina Kartika Devi³, Haeran⁴, Siti Fatimah⁵,
Ahmad Edi Saputra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Corresponding Author: mawantrick4@gmail.com

Published: September, 2026

ABSTRACT

This study aims to examine the government's role in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and to analyze this role from an Islamic economic perspective within the Talang Babat Urban Village. The study is motivated by the persistent challenges faced by MSME operators—such as limited capital and marketing constraints, as well as the unequal distribution of government assistance. A qualitative approach utilizing descriptive methods was employed. Data were gathered through observation, interviews, and documentation. Research informants included the Head of the East Tanjung Jabung Regency Cooperative and MSME Agency and MSME operators in Talang Babat. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the government has played a role in MSME empowerment through training, guidance, mentoring, and business assistance programs. From an Islamic economic perspective, this government role reflects principles of justice, public interest (maslahah), and societal welfare. Nevertheless, challenges remain, specifically regarding the uneven distribution of assistance and limited access to information for some MSME operators.

Keywords: Government Role, MSME Empowerment, Islamic Economy, Talang Babat Urban Village.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perspektif ekonomi Islam memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan pemerataan ekonomi. Islam memandang kegiatan usaha sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Keberadaan UMKM tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai upaya menciptakan kemaslahatan, membuka lapangan pekerjaan, serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mendukung dan memberdayakan UMKM melalui kebijakan, pembinaan, pelatihan, serta bantuan usaha agar UMKM mampu berkembang secara mandiri dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam (M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Samsul, diketahui bahwa mereka masih menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan usaha, terutama soal modal yang terbatas, penjualan yang belum stabil, serta kurangnya pengetahuan dalam pemasaran, khususnya secara online. Menurut Bapak Samsul, pemerintah sebenarnya sudah cukup membantu lewat program pelatihan dan bantuan usaha, namun belum semua UMKM bisa merasakannya secara merata. Akibatnya, bantuan yang diberikan belum sepenuhnya membantu perkembangan usaha mereka. Para pelaku UMKM berharap ke depannya pemerintah bisa lebih terbuka, cepat, dan tepat dalam menyalurkan bantuan agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tanjung Jabung Timur Bapak Herman Toni, SE. ME. Terkait peran pemerintah dalam pemberdayaan UMK di Kelurahan Talang Babat, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program pembinaan, pelatihan, serta pemberian bantuan sarana dan prasarana usaha guna meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku UMKM.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki landasan hukum dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini mengatur secara menyeluruh kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM, mulai dari program pembinaan, kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan usaha, hingga fasilitasi pemasaran produk lokal. Selain itu, perda ini juga mengatur mekanisme koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pihak swasta guna menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Dengan adanya regulasi ini diharapkan UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk di Kelurahan Talang Babat, dapat berkembang lebih optimal dan memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar regional maupun nasional.

Dalam pandangan ekonomi Islam, aktivitas usaha yang dijalankan oleh UMKM tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan semata, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk bekerja, berusaha, dan mengembangkan usaha secara produktif dengan tetap berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, amanah, serta menghindari praktik yang merugikan pihak lain. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang menjelaskan bahwa setelah menunaikan ibadah, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah SWT. Oleh karena itu, keberadaan UMKM dalam perspektif ekonomi Islam memiliki nilai strategis karena selain meningkatkan pendapatan masyarakat, juga berperan dalam menciptakan pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian mengenai “Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Talang Babat”. Menjadi relevan untuk memberikan gambaran nyata sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM serta kendala distribusi bantuan terhadap pelaku usaha di Kelurahan Talang Babat. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali data secara komprehensif mengenai kebijakan, program, dan implementasi pemberdayaan UMKM melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas dan faktual mengenai kondisi yang dialami pelaku usaha serta upaya pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut (Sugiyono, 2019).

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Talang Babat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dipilih karena memiliki kewenangan dan pemahaman mengenai kebijakan serta program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, pelaku UMKM dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung menerima, merasakan, dan mengalami pelaksanaan program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah.

Melalui subjek penelitian tersebut, peneliti diharapkan memperoleh informasi yang akurat dan mendalam mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM berdasarkan perspektif ekonomi Islam di Kelurahan Talang Babat. Data yang diperoleh dari para informan selanjutnya dianalisis untuk memberikan gambaran yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Informan utama dalam penelitian ini meliputi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di

Kelurahan Talang Babat, perwakilan dinas terkait Kepala Dinas Koperasi & UMKM Drs. Enizwar, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Zulfaisyal, S. AP. M.M serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai pelaksanaan pemberdayaan UMKM dan distribusi bantuan pemerintah. Data primer digunakan untuk memperoleh informasi faktual dan mendalam mengenai peran pemerintah serta kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses bantuan. Data Sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti peraturan perundang-undangan terkait UMKM, dokumen kebijakan pemerintah daerah, laporan program pemberdayaan UMKM, data kelurahan, arsip dinas terkait, serta literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data primer dalam menganalisis peran pemerintah dan kendala distribusi bantuan terhadap pelaku usaha di Kelurahan Talang Babat.

Dalam penelitian kualitatif deskriptif ini, prosedur pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan fokus penelitian. Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi non-partisipatif terhadap kondisi lapangan yang berkaitan dengan aktivitas pelaku UMKM, pelaksanaan program pemberdayaan, serta proses distribusi bantuan pemerintah di Kelurahan Talang Babat. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi UMKM, bentuk peran pemerintah, serta permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam mengakses bantuan.

2. Wawancara

Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan pelaku UMKM sebagai informan kunci, serta aparatur pemerintah kelurahan, perwakilan dinas terkait, dan tokoh masyarakat sebagai informan pendukung. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM serta kendala distribusi bantuan yang dialami pelaku usaha.

3. Pengumpulan Dokumen dan Arsip

Peneliti juga mengumpulkan dokumen dan arsip yang berkaitan dengan penelitian, seperti data UMKM di Kelurahan Talang Babat, laporan program pemberdayaan, kebijakan atau regulasi terkait bantuan UMKM, serta catatan administratif lainnya. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengolah dan menafsirkan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM serta kendala distribusi bantuan terhadap pelaku usaha di Kelurahan Talang Babat. Proses analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga analisis dan pengumpulan data berlangsung secara berkesinambungan.

PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Talang Babat

1. Pemerintah sebagai Regulator

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah telah menjalankan perannya sebagai regulator melalui penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Hal ini terlihat dari adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM yang menjadi dasar hukum pelaksanaan program UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Peran pemerintah sebagai regulator bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan usaha, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku UMKM. Temuan penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Riant Nugroho bahwa pemerintah memiliki fungsi regulator dalam mengatur dan mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator melalui pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara, bantuan tersebut cukup membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan pengembangan usaha. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam proses distribusi bantuan, seperti keterbatasan jumlah bantuan dan belum meratanya penerima program. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan UMKM agar lebih tepat sasaran.

3. Pemerintah sebagai Motivator

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemerintah daerah juga memberikan motivasi kepada pelaku UMKM melalui kegiatan pembinaan, pelatihan kewirausahaan, dan sosialisasi program usaha. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan semangat dan kreativitas pelaku usaha agar mampu bersaing dan mengembangkan usaha secara mandiri.

Motivasi yang diberikan pemerintah memiliki dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan usaha dan perkembangan teknologi digital.

4. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator terlihat dari upaya pemerintah dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan, dinas terkait, dan pelaku usaha dalam mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah berupaya menciptakan sinergi antara masyarakat dan pemerintah agar program pemberdayaan berjalan secara berkelanjutan.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui pelatihan bersama, pendampingan usaha, serta promosi produk UMKM dalam berbagai kegiatan daerah.

B. Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Perspektif Ekonomi Islam

Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Talang Babat telah mencerminkan upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan usaha, pelatihan, dan pembinaan UMKM. Dalam ekonomi Islam, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan ekonomi, membantu masyarakat ekonomi lemah, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan. Bantuan modal dan pelatihan usaha merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pelaku usaha kecil agar mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya distribusi bantuan dan keterbatasan akses informasi program. Dalam perspektif ekonomi Islam, pemerintah seharusnya memastikan bahwa bantuan diberikan secara adil, transparan, dan tepat sasaran agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di Kelurahan Talang Babat dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, amanah, dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Talang Babat, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan UMKM melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pembinaan, dan pendampingan usaha kepada pelaku UMKM. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM dapat dilihat melalui fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator, dan dinamisator. Sebagai regulator, pemerintah daerah menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung perkembangan UMKM. Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan bantuan dan pelatihan kepada pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga berperan sebagai motivator dan dinamisator dalam mendorong semangat serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan UMKM.

2. Berdasarkan perspektif ekonomi Islam, program pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti belum meratanya distribusi bantuan dan keterbatasan akses informasi bagi pelaku UMKM.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM melalui penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, peningkatan pembinaan usaha, serta memperluas sosialisasi program kepada seluruh pelaku UMKM di Kelurahan Talang Babat.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat lebih aktif mengikuti pelatihan dan program pembinaan yang diberikan pemerintah agar mampu meningkatkan kualitas produk, kemampuan pemasaran, dan daya saing usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, khususnya berdasarkan perspektif ekonomi Islam dengan cakupan penelitian yang lebih luas dan mendalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang dengan sabar mendukung dan mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, seluruh dosen, dosen pembimbing dan dosen penguji.

REFERENCES

- Agus Subagyo. Aplikasi Metode Riset: Praktik Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Methods. Malang, 2020.
- Dye, Thomas R. Understanding Public Policy. New Jersey: Pearson Education, 2008.
- Hanuna Shafariah, Edison dan Rio Mattajang. "Hubungan Orientasi Kewirausahaan dengan Pertumbuhan UMKM: Peran Aspek Permodalan dan Pemerintah sebagai Moderator." *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 2016.
- Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompi. Konsep Kewirausahaan dan UMKM. Sulawesi: Yayasan Makaria Waya, 2019.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Beverly Hills: Sage Publications, 1994.
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. Etika Ekonomi Islam. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia. Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Jakarta: Kencana, 2010.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia dan Bank Indonesia. Ekonomi Islam. Jakarta, 2013.
- Putra dan Wibowo. "Akses Permodalan dan Pemasaran UMKM di Daerah." *Jurnal Kebijakan Publik*, 2020.
- Rachmat. Pembangunan Ekonomi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.
- Rahmawati. "Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM: Peran Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Daya Saing." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2022.
- Riant Nugroho. Public Policy: Teori, Manajemen, dan Analisis Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.

Siagian, Sondang P. Administrasi Pembangunan dan Pemberdayaan UMKM. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.